



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Sultan Hasanudin No. 04 Praya 83511 email : dinsos.loteng@gmail.com

Praya, Februari 2022

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah(BPKAD) Kab.
Lombok Tengah
di -
Praya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 903/ 80 /Sos

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2021.	1 (satu) Exemplar	Dikirim dengan hormat untuk maklum dan sebagai bahan selanjutnya

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 19640424 199103 1 015



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**DI SUSUN OLEH :
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN
2021**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah untuk semester pertama yang berakhir per 31 Desember 2021 telah dapat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan.

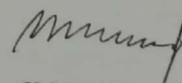
Penyusunan Laporan Keuangan dibuat sebagai bagian tugas pekerjaan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dimaksudkan untuk memberikan informasi perkembangan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Laporan ini dalam merupakn atau sebagai alat/bahan evaluasi bagi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini memuat antara lain progress yang telah dicapai menyangkut realisasi dan kemajuan fisik keuangan.

Demikian Laporan ini dibuat untuk bahan lebih lanjut.

Praya, Januari 2022
Pengguna Anggaran



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 196404241991031015

DAFTAR ISI

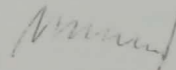
1. Pernyataan Tanggung Jawab	
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
3. Laporan Operasional	
4. Laporan Perubahan Ekuitas	
5. Neraca	
6. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	1
1. Kebijakan Akuntansi	1
1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Basis Pengukuran	2
1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	2
A. Laporan Realisasi Anggaran.....	2
1. Akuntansi Pendapatan (LRA)	2
2. Akuntansi Belanja (LRA)	3
3. Akuntansi Surplus Defisit	3
B. Laporan Operasional	3
1. Akuntansi Pendapatan-LO	4
2. Akuntansi Beban	4
3. Akuntansi Surplus Defisit – LO	4
C. Laporan Perubahan Ekuitas	4
D. Neraca	4
1. Aset	6
2. Kewajiban	11
3. Ekuitas	12
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	13
1. Pendapatan.....	13
2. Belanja.....	13
a. Belanja Operasional.....	13
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	15
1. Beban.....	15
a. Beban operasi.....	15
C. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	18
1. Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO).....	18
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	18
3. Ekuitas Akhir.....	18
D. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	18
1. Aset.....	18
a. Aset Lancar.....	18
b. Aset Tetap.....	19
c. Aset Lainnya.....	19
7. Penutup.....	20
8. Daftar Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah.



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP.196404241991031011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		675.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0	675000		
BELANJA DAERAH	0	675000		
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa	2.815.852.950,00	2.754.741.888,00	97,83	
Jumlah Belanja Operasi	2.737.613.284,00	2.619.490.979,00	95,69	
BELANJA MODAL	5.553.466.234,00	5.374.232.867,00	96,77	0,00
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00		0,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00		0,00	
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	5.553.466.234,00	5.374.232.867,00	96,77	0,00
SURPLUS/DEFISIT	-5.553.466.234,00	-5.373.557.867,00	96,76	0,00

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

H. MULIARDI, S.P.
NIP. 19610424199101001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

AKUN AKRUAL	URAIAN	DINAS SOSIAL...			
		SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
4	PENDAPATAN DAERAH-LO	675.000	- 0		0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675.000	- 0		0
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.2	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	675.000			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	-	- 0		0
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	- 0		0
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Denurat-LO				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	675.000	- 0		0
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	5.735.137.691	5.761.371.034	0	0
5.1.1	Beban Pegawai	2.754.072.408	2.210.109.799		
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.688.295.056	2.553.252.790		
5.1.3	Beban Bunga				
5.1.5	Beban Hibah		664.717.700		
5.1.6	Beban Bantuan Sosial				
	Beban Penyisihan				
	Beban Lain-lain				
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	292.770.227	333.290.745		
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				

Beban Transfer/Beban Kontan Perbaikan
Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI

5.761.371.034
(5.761.371.034)

5.761.371.034
(5.761.371.034)

0
0

SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO
Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

0
0
0

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

(5.734.462.691)
0

0
0

UMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(5.734.462.691)
0

0
0

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa

0
0

0
0

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

0
0

0
0

SURPLUS/DEFISIT - LO

(5.734.462.691)
0

(5.761.371.034)
0

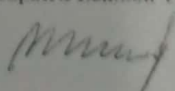
0
0



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
N E R A Y A
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan		
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penvisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya		
19	Utang Muka Pekerjaan	-	-
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penvisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	-	-
24	JUMLAH ASET LANCAR		627.259.000
25			627.259.000
26	ASET TETAP		
27	Tanah	-	-
28	Peralatan dan Mesin	3.041.100.000,00	3.041.100.000,00
29	Gedung dan Bangunan	1.800.750.965,68	1.800.750.965,68
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.244.137.950,00	3.244.137.950,00
31	Aset Tetap Lainnya	59.913.500,00	59.913.500,00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.037.600,00	9.037.600,00
33	Akumulasi Penyusutan	(2.062.043.788,03)	(2.062.043.788,03)
34	JUMLAH ASET TETAP	6.095.896.227,65	6.095.896.227,65
35			6.095.896.227,65
36	ASET LAINNYA		
37	Kelebihan dengan Pihak Ketiga	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Pembiayaan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tak Berwujud	-	-
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
41	Aset Lain-lain	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA		
44			
45	JUMLAH ASET	6.095.896.227,65	6.457.066.954,68
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	3.091.730,00	3.357.000,00
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.091.730,00	3.357.000,00
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN	3.091.730,00	3.357.000,00
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	6.092.804.497,65	6.453.709.954,68
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.095.896.227,65	6.457.066.954,68

Praya, 2021
Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

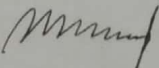

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 196404241991031015



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	6.423.709,322	4.099.431.982,05
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(5.734.462,691)	(5.764.271.831,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		(285.311.946,37)
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	(286.811.946,37)
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	1.500.000,00
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	5.373.557,867,00	8.403.860.320,00
4	EKUITAS AKHIR	6.092.804.497,65	6.414.709.471,68

Praya, 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah


Drs. H. Muliardi Yunus
NIP. 196404241991031015



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

- Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa :
 - Pendapatan – LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
 - Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas Umum Daerah/ kas SKPD
- Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- c) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

1.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara rinci, antara lain :

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2. Akuntansi Belanja (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode talun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendahaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lainlain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3. Akuntansi Surplus Defisit

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

B. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/kepada entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu: Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak -LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat

a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)

Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan

2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Klasifikasi Beban

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

2) Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak, Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya, Beban Transfer Bantuan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Lainnya

3) Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari

- Defisit penjualan aset non lancar
- Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

4) Beban Luar Biasa

Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa.

Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- Kejadiannya diluar kendali pemerintah

Beban diakui saat :

✓ Timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

✓ Terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu

✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan kas lain pada periode berjalan.

3. Akuntansi Surplus Defisit - LO

Surplus -LO adalah selisih lebih antara pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan

Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

(1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

(2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab

Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.

(3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.

(4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.

(5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan non permanen

(1) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi

permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyetoran/penyelamatan perelonoran.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Kontribusi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicalup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan

konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasi sampai pada unggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga selubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan prolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD, sehingga dalam laporan keuangan SKPD Inspektorat Kab. Loteng tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/ tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui

pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kermitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

2) Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) **Ekuitas**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp.,- dapat direalisasikan sebesar Rp.,-

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	-	-	-	-
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	675.000,00	-	-
TOTAL		0,00	675.000,00	-	0,00

2. BELANJA

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kab.Loteng yang tertuang dalam APBD 2021 adalah senilai Rp. 5.553.466.234,00 dengan realisasi yang mencapai R. 5.374.232.867,00 atau 96,77%.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	5.553.466.234,00	5.374.232.867,00	96,77	5.496.555.280,00
2.	Belanja Modal	0,00	0	0,00	34.100.000,00
Jumlah		5.553.466.234,00	5.374.232.867,00	96,77	5.530.655.280,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2021 terealisasi senilai Rp 5.374.232.867,00 atau 96,77% dari anggaran senilai Rp. 5.553.466.234,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.815.852.950,00	2.754.741.888,00	97,83	2.211.243.721,00
2	Belanja Barang Jasa	2.737.613.284,00	2.619.490.979,00	95,69	2.555.483.359,00

3	Belanja Hibah				729.828.200,00
	Jumlah	5.553.496.234,00	5.374.232.867,00	96,77	5.476.515.200,00

Adapun rincian masing-masing belanja operasi adalah sebagai berikut.

No	Uralan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.815.852.950,00	2.754.741.888,00	97,83	2.211.243.721,00
a.	Gaji dan Tunjangan	1.834.970.450,00	1.832.552.186,00	99,87	1.866.893.721,00
b.	Tambahan Penghasilan PNS	970.592.500,00	911.899.702,00	93,95	344.350.000,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.290.000,00	10.290.000,00	100,00	
	Belanja Barang Jasa	2.737.613.284,00	2.619.490.979,00	95,69	2.555.483.359,00
a.	Honorarium PNS				252.380.000,00
b.	Honorarium Non PNS				142.380.000,00
c.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.654.684,00	1.396.028.340,00	98,75	251.487.180,00
d.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
e.	Belanja Jasa Kantor	1.029.772.600,00	940.072.839,00	91,29	1.211.150.000,00
f.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.100.000,00
g.	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
2	h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	6.300.000,00
i.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.420.000,00	71.306.000,00	97,12	
j.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
k.	Belanja Makanan dan Minuman				329.870.000,00
l.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	157.650.000,00	150.150.000,00	95,24	
m.	Belanja Perjalanan Dinas	59.916.000,00	58.753.800,00	98,06	98.877.700,00
n.	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00		#DIV/0!	
	Belanja Hibah				729.828.200,00
3	a. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				706.828.200,00

3	Belanja Hibah				729.828.200,00
	Jumlah	5.853.436.234,00	5.374.232.867,00	96,77	5.450.665.200,00

Adapun rincian masing-masing belanja operasi adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.815.852.950,00	2.754.741.888,00	97,83	2.211.243.721,00
a.	Gaji dan Tunjangan	1.834.970.450,00	1.832.552.186,00	99,87	1.866.893.721,00
b.	Tambahan Penghasilan PNS	970.592.500,00	911.899.702,00	93,95	344.350.000,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.290.000,00	10.290.000,00	100,00	
	Belanja Barang Jasa	2.737.613.284,00	2.619.490.979,00	95,69	2.555.483.359,00
a.	Honorarium PNS				252.300.000,00
b.	Honorarium Non PNS				142.380.000,00
c.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.654.684,00	1.396.028.340,00	98,75	251.487.184,00
d.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
e.	Belanja Jasa Kantor	1.029.777.600,00	940.028.839,00	91,28	1.211.000,00
f.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
g.	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00
i.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.420.000,00	71.306.000,00	97,12	
j.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.9870.000,00
k.	Belanja Makanan dan Minuman				
l.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	157.650.000,00	150.150.000,00	95,24	
m.	Belanja Perjalanan Dinas	59.916.000,00	58.753.800,00	98,06	98.877.700,00
n.	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00		#DIV/0!	
	Belanja Hibah				729.828.200,00
3	a. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				708.828.200,00

b.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				21.000.000,00
Jumlah		5.583.466.234,00	5.374.232.867,00	96,77	5.496.555.280,00

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai Pengadaan Aset. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0 atau 0 % dari anggaran senilai Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin			#DIV/0!	34.100.000,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan			#DIV/0!	
Jumlah		0,00	0,00	#DIV/0!	34.100.000,00

Adapun rincian objek masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!	34.100.000,00
	a. Pengadaan Meubelair			#DIV/0!	13.200.000,00
	b. Pengadaan Alat Pembersih			#DIV/0!	2.500.000,00
	c. Pengadaan Alat Pendingin			#DIV/0!	1.600.000,00
	d. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			#DIV/0!	2.500.000,00
	e. Pengadaan Peralatan Mini			#DIV/0!	7.300.000,00
	f. Pengadaan Meja Kerja Pejabat			#DIV/0!	7.000.000,00
Jumlah		#REF!	#REF!	#REF!	34.100.000,00

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021.

1. BEBAN

Beban Dinas Sosial untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.5.735.137.691,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. **Beban Operasi**

Beban Operasi tahun anggaran 2021 merupakan beban yang ditanggung oleh SKPD dalam hal ini Dinas Sosial selama satu tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 5.735.137.691,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Beban	2021	2020
1	Beban Pegawai	2.754.072.408,00	
2	Beban Persediaan	1.464.428.840,00	
3	Beban Jasa	1.093.806.416,00	
4	Beban Pemeliharaan	71.306.000,00	
5	Beban Perjalanan Dinas	58.753.800,00	
6	Beban Hibah	-	
6	Beban Penyusutan dan amortisasi	292.770.227,00 -	
Jumlah		5.735.137.691,00	

Adapun rincian objek masing-masing beban operasi adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2021	2020
1	Beban Pegawai	2.754.072.408,00	
	a. Gaji dan Tunjangan	1.831.882.706,00	
	b. Tambahan Penghasilan PNS	911.899.702,00	
	c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10.290.000,00	
2	Beban Persediaan	1.464.428.840,00	
	a. Beban Bahan Pakai Habis	1.464.428.840,00	
	b. Beban Bahan/Material		
	c. Beban Cetak		
3	Beban Jasa	1.093.806.416,00	
	a. Honorarium PNS		
	b. Honorarium Non PNS		
	c. Beban Jasa Kantor	940.456.416,00	
	d. Beban Penggandaan		
	e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
	f. Beban Makanan dan Minuman		
	g. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	150.150.000,00	

	h. Beban Natura dan Pekan Natura		
	i. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	
4	Beban Perjalanan Dinas	58.753.800,00	
	a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.753.800,00	
	b. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	c. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		
5	Beban Pemeliharaan	71.306.000,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.306.000,00	
6	Beban Hibah		
	a. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
	b. Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	292.770.227,00	
	Jumlah	5.735.137.691,00	

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Dari Pendapatan dan Beban Operasional diatas, diketahui Surplus/(Defisit) Operasional Per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp(5.734.462.691,00) terdiri dari:

No.	Jenis Beban	2021	2020
1	Pendapatan-LO		
2	Beban-LO	5.734.462.691,00	(5.764.271.034,00)
	Surplus/(Defisit) Operasional	(5.734.462.691,00)	(5.764.271.034,00)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat aktifitas kegiatan non operasional sehingga Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional masih sama dengan tahun sebelumnya

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA

Dari Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional, diketahui Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp(5.734.462.691,00) terdiri dari:

No.	Jenis Beban	2021	2020
1	Surplus/(Defisit) Operasional	(5.734.462.691,00)	(5.764.271.934,00)
2	Surplus/(Defisit) Non Operasional		
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5.734.462.691,00)	(5.764.271.934,00)

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp.6.453.709.322,00. Ekuitas awal merupakan ekuitas tahun 2020.

2. Surplus/(Defisit)-Laporan Operasional (LO)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(5.734.462.691,00)
Jumlah		(5.734.462.691,00)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya berupa koreksi saldo awal aset tetap tahun sebelumnya ditambah dengan pengadaan barang extracurricular tahun berjalan.

Dalam hal ini sampai dengan 31 Desember 2021 belum terdapat koreksi saldo atas ekuitas tahun sebelumnya.

4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.6.092.804.497,65,00

D. PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,00 terdiri dari:

- 1) Kas Di Bendahara Penerimaan
- 2) Piutang Pendapatan
- 3) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis dan persediaan barang lainnya yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

b. Aset Tetap
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp. 6.095.896.227,65,00.,

Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	3.044.100.000,00	3.044.100.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.800.750.965,68	1.800.750.965,68
3	Gedung dan Bangunan	3.244.137.950,00	3.244.137.950,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	59.913.500,00	59.913.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.037.600,00	9.037.600,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Perolehan Aset Tetap	8.157.940.015,68	8.157.940.015,68
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.062.043.788,03)	(1.769.273.561,00)
	Jumlah	6.095.896.227,65	6.388.666.455,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

1) Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp.3.044.100.000,00

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp.1.800.750.965,68.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.3.244.137.950,00, Sampai dengan 31 Desember 2020 Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan estimasi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo perolehan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.59.913.500,00, Sampai dengan 31 Desember 2020 Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan estimasi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp.9.037.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

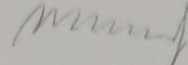
c. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp.9.037.600,00.

E. PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 196404241991031015